

## **ANALISIS KEADILAN BANK DALAM BERTRANSAKSI : HUBUNGAN DENGAN LIKUIDITAS, PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA BANK**

**Ryan Afjune Supriyanto Putra<sup>1</sup>, Lelya Cahya Mufidati<sup>2</sup>,  
Syawalia Aziza<sup>3\*</sup>, Beta Amalia Nur Fajrin<sup>4</sup>, Vella Putri Anjani,<sup>5</sup> Diana Setiawati<sup>6</sup>**  
<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia  
Email : [syawaliaajija@gmail.com](mailto:syawaliaajija@gmail.com) \*

### **Abstrak**

Perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam menghubungkan perekonomian dengan masyarakat. Keadilan dalam transaksi perbankan adalah elemen kunci untuk memastikan kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan bank dalam konteks transaksi perbankan dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan keadilan bank secara keseluruhan. Dalam hal memperoleh pengetahuan yang diperlukan, penelitian ini berfokus pada ilmu hukum normatif karena dalam penelitian ini memandang konsep hukum sebagai norma positif dalam sistem hukum nasional, Pada penelitian juga dilakukan penafsiran terhadap asas hukum yang berlaku dan berkembang pada hukum persaingan usaha karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum, didukung dengan berbagai literatur yang masih relevan dengan judul artikel ini. Lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, memainkan peran penting dalam mendistribusikan keadilan sosial di masyarakat. Penerapan prinsip dan peran keadilan dan tanggung jawab sosial sangat penting bagi lembaga keuangan karena memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mereka dan mendorong stabilitas keberlanjutan sistem keuangan keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan fungsi lembaga keuangan sebagai perantara dalam mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi, penyedia dana bagi yang membutuhkan, dan pengurangan risiko bagi deposan. Prinsip keadilan dan tanggung jawab bank dan lembaga keuangan non-bank berpotensi untuk mencapai keadilan sosial di masyarakat.

**Kata Kunci :** Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Keadilan.

### **Abstract**

*Banking plays a very important role in connecting the economy with society. Fairness in banking transactions is a key element to ensure the confidence and stability of the financial system as a whole. The study aims to provide a better understanding of bank fairness in the context of banking transactions and how this can contribute to the improvement of overall bank fairness. In terms of obtaining the necessary knowledge, this study focuses on normative legal science because in this study views the concept of law as a positive norm in the national legal system, In this research also carried out an interpretation of applicable and developing legal principles in business competition law because legal principles are an ideal element of the law, supported by various literature that is still relevant to the title of this article. Financial institutions, both banks, and non-banks, play an important role in distributing social justice in society. The application of the principles and roles of justice and social responsibility is very important for financial institutions as it strengthens public trust in them and promotes the stability of the sustainability of the overall financial system. This relates to the function of financial institutions as intermediaries in payment mechanisms between economic actors, providers of funds for those in need, and risk reduction for depositors. The principle of fairness and responsibility of banks and non-bank financial institutions has the potential to achieve social justice in society.*

**Keywords :** Bank Financial Institutions, Non-Bank Financial Institutions, and Justice.

## **PENDAHULUAN**

Perbankan memainkan peran yang sangat penting dalam menghubungkan perekonomian dengan masyarakat. Sebagai lembaga perantara keuangan utama, bank bertanggung jawab dalam memberikan layanan keuangan yang adil, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Keadilan dalam transaksi perbankan adalah elemen kunci untuk memastikan kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Keadilan bank terhadap masyarakat dalam bertransaksi mencakup berbagai aspek, termasuk perlakuan yang adil terhadap nasabah, transparansi dalam biaya dan ketentuan produk perbankan, serta akses yang setara terhadap layanan keuangan. Keadilan distributif, di mana manfaat dan beban transaksi terdistribusi secara merata di antara pihak-pihak yang terlibat, juga menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan ekonomi. Selain itu, pemahaman tentang likuiditas dan profitabilitas bank menjadi kunci dalam memahami kinerja bank. Likuiditas bank mengacu pada kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan dan mempertahankan kestabilan operasionalnya. Sementara itu, profitabilitas bank menjadi indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan bisnis bank dan kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan.

Namun, meskipun keadilan, likuiditas, dan profitabilitas adalah faktor-faktor yang sangat penting dalam operasi perbankan, hubungan antara ketiganya dan dampaknya terhadap kinerja bank masih memerlukan analisis yang lebih mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang cermat dan komprehensif untuk menganalisis keadilan bank terhadap masyarakat dalam bertransaksi, dengan mempertimbangkan pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kinerja bank.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan bank dalam konteks transaksi perbankan dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan keadilan bank secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali hubungan antara likuiditas, profitabilitas, dan kinerja bank sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keadilan bank terhadap masyarakat. Dengan memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang dinamika ini, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi pemangku kepentingan perbankan, regulator, dan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan praktik perbankan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sebagai lembaga keuangan yang kritis dalam perekonomian.

Perantara ini memainkan peran penting sebagai penghubung antara pihak-pihak dengan kelebihan barang dan jasa dan mereka yang membutuhkannya. Mereka memfasilitasi

proses pertukaran dengan menyediakan ruang yang memadai dan menyatukan penjual dan pembeli. Perantara dapat berupa lembaga keuangan seperti bank, lembaga kredit, atau lembaga keuangan non-bank, serta struktur pasar fisik seperti pasar tradisional, mal, atau pusat perbelanjaan. Kehadiran perantara, baik dalam bentuk lembaga keuangan atau struktur pasar fisik, memainkan peran penting dalam dunia bisnis. Mereka memfasilitasi kelancaran transaksi, memberikan kepercayaan dan keamanan bagi pelaku usaha, serta membantu mencarikan mitra transaksi yang sesuai. Tanpa perantara, proses pertukaran barang dan jasa akan menjadi lebih rumit, tidak efisien, dan sulit dilakukan dalam skala yang lebih besar. Oleh karena itu, peran perantara di pasar barang dan jasa modern sangat signifikan.

## **METODE PENELITIAN**

Mengenai upaya untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif karena peneliti dalam penelitian ini memandang konsep hukum sebagai norma positif dalam sistem hukum nasional, yang berfungsi sebagai ukuran perilaku atau tindakan dengan standar peraturan-peraturan tersebut. Menurut Irfani, ketika hukum dipahami sebagai norma positif dalam peraturan perundang-undangan nasional, maka metode penelitiannya terutama bersifat normatif melalui logika deduktif untuk membangun sistem hukum positif, maka spesifikasi penelitian ini adalah penelitian normatif, artinya penelitian-penelitian tersebut akan melakukan interpretasi atas prinsip hukum persaingan usaha korporasi yang ada dan/atau sedang berkembang karena prinsip hukum merupakan bagian yang ideal dari undang-undang, terutama dalam pasal-pasal yang memuat asas-asas hukum. Pada penelitian ini dilakukan penafsiran-penafsiran terhadap asas hukum yang berlaku dan atau berkembang pada hukum persaingan usaha karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum, terutama pada pasal-pasal yang mengandung kaidah hukum, Dilanjutkan dengan menganalisa permasalahan yang ada dengan konsep-konsep hukum yang didukung dengan berbagai literatur seperti buku-buu, jurnal, artikel dan lain sebagainya yang masih relevan dengan judul artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Lembaga Keuangan**

Secara umum, lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai entitas yang beroperasi di sektor keuangan untuk memberikan layanan kepada pelanggan atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keuangannya. Fungsi lembaga keuangan meliputi:

- 1) Bertindak sebagai perantara dalam pertukaran produk (barang dan jasa) menggunakan instrumen uang dan kredit. Lembaga keuangan berperan sebagai perantara dalam memfasilitasi pertukaran produk-produk tersebut. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang memudahkan transaksi dalam perekonomian, dengan penggunaan instrumen kredit seperti kartu kredit, cek, dan lain-lain.
- 2) Menghimpun dana dari rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke sektor korporasi melalui pinjaman. Dengan kata lain, lembaga keuangan mengumpulkan dana dari mereka yang memiliki dana surplus dan mengalokasikannya kepada mereka yang membutuhkan dana. Ini dikenal sebagai peran "intermediasi", di mana lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara sektor rumah tangga dan korporasi.
- 3) Memberikan analisis dan informasi ekonomi. Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk menganalisis kondisi ekonomi dan kredit untuk keuntungan mereka dan kepentingan pelanggan mereka. Mereka juga bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi dan kegiatan yang bermanfaat kepada pelanggan mereka. Analisis ekonomi dan informasi yang disediakan oleh lembaga keuangan sangat berharga bagi lembaga itu sendiri dan pelanggan mereka.
- 4) Analisis dan informasi ekonomi juga penting bagi lembaga keuangan untuk memastikan keamanan dana yang dialokasikan untuk nasabah peminjam, untuk mengurangi risiko gagal bayar. Misalnya, ketika memberikan kredit untuk kegiatan investasi, lembaga keuangan akan melakukan analisis mikro dan makroekonomi. Analisis ekonomi mikro mengevaluasi kelayakan pelanggan memperoleh pinjaman dan kemampuan mereka untuk membayarnya kembali, sementara analisis ekonomi makro melibatkan mempelajari ekonomi nasional untuk mendapatkan data ekonomi makro yang relevan.
- 5) Lembaga keuangan juga memiliki peran dalam memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana yang dipercayakan kepada mereka oleh masyarakat.
- 6) Selain itu, lembaga keuangan menciptakan dan menyediakan likuiditas. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana yang mereka setorkan akan tersedia saat dibutuhkan atau pada saat jatuh tempo.

Untuk memperkuat dana tabungan yang dikumpulkan dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, diperlukan kebijakan moneter. Beberapa kebijakan moneter yang dapat dilaksanakan antara lain membeli dan menjual surat berharga di pasar efek (open market operations), mengatur tingkat diskonto dan

suku bunga yang harus dibayar oleh bank umum, dan menetapkan persyaratan cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank umum.

#### **a. Fungsi Lembaga Keuangan**

Lembaga keuangan di sektor keuangan berperan sebagai penyedia jasa keuangan kepada nasabahnya, umumnya diatur oleh peraturan keuangan pemerintah. Jenis lembaga keuangan yang umum termasuk lembaga perbankan, masyarakat pembangun (sejenis koperasi di Inggris), serikat kredit, pialang saham, perusahaan manajemen aset, perusahaan modal ventura, koperasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan bisnis serupa. Secara umum, lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok: lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan seperti perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan efek, lembaga pembiayaan, dan lain-lain.

Fungsi lembaga keuangan ini adalah bertindak sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang, bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana dari investor ke perusahaan yang membutuhkan. Keberadaan lembaga keuangan memudahkan aliran uang dalam perekonomian, di mana uang investor individu dikumpulkan dalam bentuk tabungan. Dengan demikian, risiko dari investor ini ditransfer ke lembaga keuangan, yang kemudian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada mereka yang membutuhkan. Tujuan utama lembaga keuangan sebagai perantara dana adalah untuk menghasilkan pendapatan.

#### **b. Lembaga Perbankan**

Secara umum, bank adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara rumah tangga dan sektor industri dalam hal penyerapan dan alokasi dana. Bank menghimpun dana dari rumah tangga dalam bentuk tabungan dan memberikan kredit investasi kepada sektor industri. Namun, dalam praktiknya, penyerapan dan alokasi dana juga dapat terjadi di dalam rumah tangga dan sektor industri itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, bank merupakan perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, dengan fokus pada kegiatan perbankan.

Fungsi utama bank adalah menyediakan layanan yang berkaitan dengan penyimpanan dan peminjaman dana. Bank menerima simpanan dari publik dan secara aktif memberikan kredit kepada pelanggan. Evolusi perbankan dimulai dari era catatan tertulis dan terus berkembang hingga saat ini ketika bank telah menjadi lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan. Saat ini, bank adalah lembaga perbankan berlisensi yang

diberikan oleh otoritas pengawas keuangan, yang memungkinkan mereka untuk menyediakan layanan perbankan dasar seperti menerima simpanan dan memberikan pinjaman.

### **c. Tujuan Layanan Perbankan**

Layanan perbankan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Layanan ini umumnya melayani dua tujuan utama. Bank berfungsi sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi pelanggan. Bank menawarkan berbagai layanan seperti uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Peran ini sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena, tanpa alat pembayaran yang efisien, perdagangan hanya akan bergantung pada barter, yang memakan waktu dan tidak efisien.

Bank juga berperan dalam menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada mereka yang membutuhkan dana. Artinya, bank menyalurkan dana untuk investasi dan pemanfaatan produktif. Jika peran ini dijalankan secara efektif, perekonomian suatu negara akan mengalami pertumbuhan. Tanpa aliran dana ini, uang akan tetap menganggur di tangan individu, orang tidak akan memiliki akses ke pinjaman, dan bisnis akan berjuang untuk berkembang karena kurangnya dana pinjaman. Secara keseluruhan, layanan perbankan memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi. Bank tidak hanya menyediakan alat pembayaran yang efisien tetapi juga menyalurkan dana untuk investasi dan kemajuan ekonomi. Keberadaan layanan perbankan yang efektif dan berfungsi dengan baik merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara.

### **d. Jenis Bank**

Secara umum, kami memiliki pengetahuan tentang beberapa jenis lembaga keuangan, antara lain Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Dengan berbagai jenis bank dan lembaga keuangan, sistem keuangan suatu negara dapat berfungsi secara efektif, menyediakan layanan keuangan yang beragam, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Berikut penjelasan masing-masing:

- a) **Bank Sentral** adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengatur kebijakan moneter suatu negara. Fungsinya antara lain menetapkan suku bunga, mengendalikan inflasi, mengelola cadangan devisa, dan menyediakan sistem pembayaran yang efisien.
- b) **Bank Umum**, di sisi lain, adalah lembaga keuangan yang melayani berbagai kebutuhan perbankan masyarakat umum. Mereka menawarkan berbagai macam produk dan layanan, termasuk rekening tabungan, deposito, pinjaman, kartu kredit, dan transaksi perbankan lainnya.

- c) **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** adalah lembaga keuangan yang fokus memberikan kredit kepada masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah. BPR biasanya lebih terkonsentrasi di wilayah atau wilayah tertentu dan sering berfungsi sebagai lembaga keuangan inklusif untuk mempromosikan ekonomi lokal.
- d) **Lembaga Keuangan Non-Bank** adalah lembaga keuangan yang tidak berstatus bank tetapi memberikan jasa keuangan seperti asuransi, perusahaan efek, dana pensiun, dan manajemen investasi. Mereka berperan dalam memberikan alternatif investasi dan manajemen risiko bagi individu dan perusahaan.

**e. Makna Keadilan dalam Perbankan bagi Masyarakat**

Dalam konteks ekonomi, keadilan yang diberikan oleh lembaga keuangan, baik bank, maupun non-bank, merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan bahkan dijadikan sebagai pondasi utama dalam sistem ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara. Tanpa dasar keadilan ini, sistem ekonomi dapat menghasilkan kebebasan bagi setiap pemain di sektor keuangan, termasuk bank dan non-bank, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penderitaan bagi masyarakat. Diakui bahwa tidak semua segmen masyarakat dapat memperoleh manfaat dari akses layanan keuangan yang disediakan oleh bank dan non-bank, terutama lembaga keuangan non-bank yang selama ini memiliki keterbatasan interaksi dengan mayoritas penduduk. Di bidang ekonomi, keadilan yang diberikan oleh lembaga keuangan merupakan prinsip penting yang membentuk dasar perekonomian suatu negara. Prinsip ini memastikan bahwa sistem ekonomi berfungsi secara adil dan merata, tanpa memihak pihak atau kelompok tertentu. Keadilan berfungsi sebagai fondasi yang sangat diperlukan karena, tanpanya, sistem ekonomi dapat menghasilkan ketidakseimbangan, ketidaksetaraan, dan kesulitan bagi masyarakat.

Peran lembaga keuangan, baik bank, maupun non-bank, sangat krusial dalam memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat. Namun, masih ada segmen masyarakat yang belum dapat mengakses layanan tersebut. Secara khusus, lembaga keuangan non-bank masih relatif tidak dikenal dan tidak dapat diakses oleh mayoritas penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat dan akses keuangan di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mempromosikan inklusi keuangan dan memperluas akses ke lembaga keuangan untuk semua segmen masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah dan lembaga terkait sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan memfasilitasi akses keuangan yang lebih luas. Dengan

demikian, keadilan ekonomi dapat tercapai, dan manfaat lembaga keuangan, baik bank, maupun non-bank, dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Tuntutan untuk memastikan bahwa pembuat kebijakan yang terkait dengan lembaga keuangan, termasuk bank dan non-bank, memberikan akses yang adil dalam mendistribusikan keadilan kepada masyarakat telah diungkapkan selama beberapa waktu. Pakar hukum juga memberikan wawasan berharga tentang nilai-nilai keadilan. Andriani berpendapat bahwa sejarah perkembangan hukum tidak selalu mengedepankan keadilan. Pada masa pemerintahan raja-raja, ada produk hukum yang tidak terbatas dan tidak memenuhi prinsip keadilan, sehingga dianggap tidak adil pada waktu itu. Di sisi lain, Rochmat Soemito berpendapat bahwa peraturan hukum sebagai kumpulan aturan yang mengatur distribusi ekonomi selalu melayani keadilan karena hukum, seperti hukum lainnya, juga melayani kepentingan masyarakat.

Keadilan sendiri merupakan konsep yang abstrak dan sulit diamati, yang seringkali menimbulkan berbagai pendapat dalam merumuskannya. Namun, keadilan benar-benar hidup dalam jiwa setiap manusia, maka sering digunakan istilah keadilan. Keadilan dalam hukum, yang pada dasarnya harus universal dan adil, lebih mudah untuk dinyatakan atau ditulis di atas kertas daripada diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, akses yang adil di bidang ekonomi harus dirasakan dengan rasa keadilan. Meskipun demikian, untuk memiliki dasar untuk "mengukur" keadilan, diperlukan patokan umum.

Patokan umum yang dapat dijadikan panduan untuk mengukur keadilan adalah prinsip proporsionalitas. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap anggota masyarakat harus diperlakukan sama dan adil mengenai kondisi yang menyebabkan kebahagiaan atau penderitaan, sejalan dengan kontribusi mereka untuk menciptakan kondisi tersebut. Meskipun prinsip proporsionalitas dapat dijadikan tolok ukur, penting juga untuk ditambahkan bahwa keadilan tercapai ketika ada keseimbangan dalam masyarakat, di mana setiap individu mengakui hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, Van Der Tas berpendapat bahwa kesadaran hukum dapat digunakan sebagai ukuran keadilan karena kesadaran hukum dapat diamati di masyarakat melalui parlemen, kritik media, penelitian ilmiah, dan sebagainya. Oleh karena itu, hak untuk menerima layanan di bidang ekonomi dapat dibenarkan, tetapi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, hak-hak tersebut harus selaras dengan kewajiban dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **Peran Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Mendistribusikan Keadilan Sosial**

Lembaga keuangan, baik bank maupun entitas non-bank, memainkan peran penting dalam mendistribusikan keadilan sosial di masyarakat. Peran-peran ini meliputi: Mobilisasi Dana kepada Publik, Alokasi Dana kepada Publik, Transfer Aset, Likuiditas, Realokasi Pendapatan, dan Transaksi.

Agar dapat diketahui lebih lanjut mengenai peran ini maka diuraikan sebagai berikut:

### **a. Mobilisasi Dana Kepada Masyarakat**

Mobilisasi dana dari masyarakat merupakan peran yang dilakukan oleh perbankan melalui tabungan, deposito, dan sumber pendanaan lainnya. Ini memberikan kesempatan bagi individu untuk menyimpan dan menginvestasikan uang mereka dengan aman. Lembaga keuangan perbankan dapat mengakumulasi dana baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, dana dapat diakumulasikan melalui rekening tabungan, rekening giro, deposito, dan penerbitan surat berharga atau saham kepada masyarakat. Secara tidak langsung, dana dapat dikumpulkan melalui investasi, pinjaman, atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank hanya dapat mengakumulasi dana secara tidak langsung, terutama melalui penerbitan surat berharga atau saham, dan melalui investasi, pinjaman, atau kredit yang diberikan oleh lembaga lain.

### **b. Alokasi Dana Untuk Umum**

Bank adalah lembaga yang dapat memberikan dana kepada masyarakat dengan tujuan utama mendistribusikan keadilan melalui penyediaan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Dana yang diberikan oleh bank dapat diarahkan ke berbagai jenis usaha, seperti kemitraan, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha daerah, dan koperasi. Selain itu, individu dalam masyarakat juga dapat memperoleh dana dari bank untuk tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Di sisi lain, lembaga keuangan nonbank juga berperan signifikan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mencapai distribusi keadilan di masyarakat. Meskipun mereka bukan bank, lembaga-lembaga ini juga mampu menyediakan dana untuk bisnis dan individu dalam masyarakat. Biasanya, alokasi dana oleh lembaga keuangan non-bank lebih difokuskan pada tujuan investasi, biasanya dilakukan oleh pelaku usaha dalam jangka menengah dan panjang.

### **c. Transfer Aset**

Salah satu aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan adalah "Promises To Pay," yang mengacu pada pinjaman kepada pihak ketiga dengan jangka waktu yang bervariasi tergantung pada kebutuhan peminjam. Aset-aset ini dibiayai oleh tabungan publik. Pada dasarnya, lembaga keuangan hanya mengalihkan atau mengalihkan kewajiban peminjam ke aset yang jatuh tempo sesuai dengan preferensi deposan. Lembaga keuangan membantu dengan meminjamkan dana secara bebas dari pemilik dana kepada peminjam yang tidak dikenal dengan biaya transaksi dan informasi yang relatif rendah dibandingkan dengan peminjam yang perlu mencari dan bertransaksi secara langsung. Proses pengalihan liabilitas menjadi aset dikenal sebagai konversi aset. Transfer aset mengacu pada proses atau tindakan mentransfer kepemilikan atau pengendalian aset dari satu entitas atau individu ke entitas atau individu lainnya. Ini dapat melibatkan transfer aset dalam berbagai bentuk, termasuk uang tunai, properti, investasi, saham, atau hak kekayaan intelektual.

Transfer Aset dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, hukum, atau keuangan. Berikut adalah beberapa contoh umum transfer aset:

#### **1. Pengalihan Bisnis**

Transfer ini dapat terjadi ketika ada perubahan kepemilikan atau kontrol perusahaan atau bisnis. Misalnya, ketika pemilik bisnis menjual bisnis mereka ke pihak lain, itu merupakan transfer aset. Transaksi semacam itu dapat melibatkan penjualan saham, penjualan aset perusahaan, atau merger dengan perusahaan lain.

#### **2. Transfer Properti**

Transfer ini dapat terjadi ketika kepemilikan atau hak atas properti fisik seperti tanah, rumah, atau bangunan ditransfer dari satu individu atau entitas ke entitas lain.

#### **3. Pengalihan Keuangan**

Transfer ini terjadi ketika kepemilikan atau kontrol atas instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, atau rekening bank, ditransfer dari satu pihak ke pihak lain. Misalnya, jika seseorang mentransfer saham mereka ke orang lain, itu dianggap sebagai transfer aset.

#### **4. Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual**

Transfer ini terjadi ketika hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, atau rahasia dagang, ditransfer dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Contohnya termasuk menjual hak cipta lagu ke perusahaan rekaman atau melisensikan paten ke perusahaan lain.

Transfer aset dapat melibatkan berbagai persyaratan hukum, pajak, atau peraturan tergantung pada yurisdiksi tempat transaksi berlangsung. Penting untuk mencari nasihat

hukum dan keuangan yang kompeten sebelum melakukan transfer aset untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan kepentingan Anda.

#### **d. Likuiditas**

Likuiditas mengacu pada kemampuan untuk mengakses uang tunai dengan cepat saat dibutuhkan. Bank menyediakan likuiditas kepada masyarakat dengan menawarkan fasilitas seperti rekening, layanan pengecekan, dan kartu debit. Ini memfasilitasi transaksi keuangan sehari-hari dan mendukung kegiatan ekonomi. Kecukupan likuiditas sangat penting bagi lembaga keuangan non-bank karena memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan lancar dan memberikan layanan keuangan yang stabil kepada masyarakat.

Likuiditas yang memadai juga berkontribusi untuk mendistribusikan keadilan sosial di masyarakat dalam beberapa cara:

##### **1. Akses ke layanan keuangan yang stabil**

Lembaga keuangan non-bank yang kaya likuiditas dapat memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Dengan likuiditas yang cukup, mereka dapat memenuhi permintaan pinjaman, menawarkan fasilitas tabungan, dan memudahkan transaksi keuangan. Ini membantu masyarakat mendapatkan akses ke layanan keuangan yang stabil dan andal.

##### **2. Pengurangan ketidakpastian keuangan**

Kecukupan likuiditas di lembaga keuangan non-bank membantu mengurangi ketidakpastian keuangan di masyarakat. Ketika lembaga keuangan dapat memenuhi kewajiban mereka dengan membayar kembali dana kepada pelanggan atau pemegang klaim, itu menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan. Orang menjadi lebih percaya diri di lembaga keuangan ini dan merasa aman dalam menyimpan dan mengelola uang mereka.

##### **3. Mitigasi risiko sistemik**

Adanya kecukupan likuiditas di lembaga keuangan non-bank juga membantu memitigasi risiko sistemik. Risiko sistemik terkait dengan kerentanan seluruh sistem keuangan terhadap guncangan atau gangguan. Dengan likuiditas yang memadai, lembaga keuangan non-bank dapat bertahan dari tantangan keuangan dan terus beroperasi, mengurangi kemungkinan krisis keuangan yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas.

##### **4. Dukungan untuk pertumbuhan ekonomi**

Lembaga keuangan non-bank yang kaya likuiditas dapat menyediakan dana dan pembiayaan yang cukup bagi pelaku ekonomi, seperti usaha kecil atau usaha mikro. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi di masyarakat dengan menyediakan akses ke modal yang

diperlukan untuk memulai atau memperluas bisnis. Pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dapat berkontribusi pada distribusi keadilan sosial di masyarakat.

#### **e. Realokasi Pendapatan**

Sebagian besar individu dengan penghasilan yang cukup yang menyadari pensiun mereka yang akan datang mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Namun, dengan melihat ke masa depan, mereka mengalokasikan atau memanfaatkan pendapatan mereka untuk persiapan masa depan. Pada dasarnya, mereka hanya dapat membeli atau menyimpan aset berwujud seperti tanah atau rumah, tetapi memiliki sekuritas sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan seperti program tabungan, deposito, program pensiun, asuransi, atau saham jauh lebih unggul daripada opsi pertama. Realokasi pendapatan dapat menjadi instrumen untuk mencapai distribusi keadilan sosial di masyarakat tetapi harus memenuhi beberapa cara di mana realokasi pendapatan dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Lembaga keuangan non-bank dapat memberikan pinjaman berbunga rendah kepada kelompok yang kurang beruntung atau kurang terlayani di masyarakat. Ini membantu mempromosikan inklusi keuangan dan memberikan peluang bagi individu atau kelompok yang mungkin tidak memiliki akses ke modal untuk memulai bisnis atau memperbaiki kondisi ekonomi mereka.

Melalui program edukasi dan pelatihan keuangan, lembaga keuangan nonbank dapat menggunakan pendapatannya untuk menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan keuangan bagi masyarakat. Ini dapat membantu meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan manajemen keuangan di antara individu atau kelompok yang mungkin kurang mahir dalam bidang ini. Dengan menyediakan akses ke pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan, lembaga keuangan dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Realokasi pendapatan oleh lembaga keuangan non-bank dapat digunakan untuk mendukung program sosial yang bertujuan membantu masyarakat kurang beruntung. Ini dapat mencakup pendanaan program pemberdayaan ekonomi, program kesehatan, program pendidikan, atau program pengentasan kemiskinan. Dengan mendukung program-program ini, lembaga keuangan non-bank berperan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan distribusi keadilan sosial di masyarakat. Dalam investasi proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, lembaga keuangan non-bank juga dapat mengalokasikan pendapatannya untuk berinvestasi pada proyek yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ini dapat mencakup investasi dalam energi terbarukan, proyek lingkungan, atau usaha sosial yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan cara ini, lembaga

keuangan non-bank dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.

#### **f. Transaksi**

Instrumen keuangan sekunder yang diterbitkan oleh perantara keuangan adalah bagian dari mekanisme pembayaran seperti rekening giro, dan rekening tabungan (deposito, dll.). Rekening giro atau tabungan tertentu yang ditawarkan oleh bank pada dasarnya berfungsi sebagai dana. Produk tabungan ini dibeli, memungkinkan rumah tangga dan unit bisnis untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Dalam beberapa kasus, unit bisnis membeli sekuritas sekunder (seperti cek) untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang sedang berlangsung. Lembaga keuangan dengan demikian bertindak sebagai perantara keuangan yang menyediakan layanan untuk memfasilitasi transaksi keuangan. Selain itu, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank memegang peranan penting dalam mendistribusikan keadilan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa peran kunci lembaga keuangan dalam hal ini:

##### 1. Akses keuangan

Lembaga keuangan menyediakan akses keuangan kepada publik dengan menawarkan layanan seperti pembukaan rekening bank, pinjaman, kredit, dan pembiayaan. Hal ini memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mengakses modal dan sumber daya yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang.

##### 2. Alokasi dana

Lembaga keuangan bertindak sebagai perantara antara mereka yang memiliki kelebihan dana (penabung atau investor) dan mereka yang membutuhkan dana (peminjam atau debitur). Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya melalui pinjaman, investasi, atau pembiayaan kepada individu, perusahaan, atau sektor ekonomi tertentu.

##### 3. Manajemen risiko

Lembaga keuangan membantu mengelola risiko keuangan dengan menyediakan produk asuransi dan instrumen keuangan lainnya. Mereka membantu melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang tak terduga dan memberikan perlindungan finansial yang penting.

##### 4. Nasihat keuangan

Lembaga keuangan menyediakan layanan dan nasihat keuangan kepada publik. Mereka membantu individu dan bisnis dalam perencanaan keuangan, manajemen anggaran, manajemen investasi, dan optimalisasi pengeluaran. Ini membantu meningkatkan pemahaman keuangan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan pribadi dan bisnis.

## 5. Pembangunan ekonomi

Melalui alokasi dana dan pembiayaan investasi, lembaga keuangan berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat. Mereka mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi dan pengembangan di sektor ekonomi.

Secara khusus, peran lembaga keuangan meliputi:

- A. Memfasilitasi pertukaran produk (barang dan jasa) dengan instrumen moneter dan kredit.
- B. Memobilisasi dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Dengan kata lain, lembaga keuangan mengumpulkan dana dari mereka yang memiliki kelebihan dana dan mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan dana.
- C. Memberikan informasi, seperti:
  - 1) Lembaga keuangan menjalankan tugasnya sebagai analis keuangan dan kredit sesuai dengan kepentingan mereka dan kepentingan klien mereka.
  - 2) Lembaga keuangan berkewajiban untuk menyebarkan informasi dan kegiatan yang bermanfaat kepada pelanggan mereka.
- D. Memberikan jaminan hukum dan moral atas keamanan dana yang dipercayakan kepada lembaga keuangan dan keamanan publik.
- E. Menciptakan dan menyediakan likuiditas. Lembaga keuangan dapat memberikan ketenangan pikiran kepada nasabahnya bahwa dana yang disetorkan akan dikembalikan saat dibutuhkan atau pada saat jatuh tempo.

Secara keseluruhan, baik bank maupun lembaga keuangan non-bank memainkan peran penting dalam mendistribusikan keadilan dalam masyarakat dengan menyediakan akses keuangan, alokasi dana, manajemen risiko, nasihat keuangan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penting untuk dicatat bahwa distribusi keadilan dalam masyarakat melibatkan banyak faktor dan tidak semata-mata terbatas pada peran lembaga keuangan non-bank. Pemerintah, kebijakan publik, peraturan, dan kesadaran akan pentingnya inklusi keuangan juga merupakan faktor yang sangat relevan dalam mencapai distribusi keadilan yang lebih baik di masyarakat.

Baik bank maupun lembaga keuangan non-bank dalam sistem keuangan suatu negara memiliki setidaknya tujuh peran inti, yaitu:

### **a. Fungsi Tabungan**

Dalam konteks keuangan, fungsi tabungan meliputi penyediaan metode dan instrumen yang berfungsi untuk menghimpun dana, seperti obligasi, saham, dan instrumen lain yang

diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Instrumen ini memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Dana yang diperoleh melalui kepemilikan instrumen ini kemudian dapat diinvestasikan kembali dalam produksi barang dan jasa, sehingga merangsang kegiatan ekonomi.

Tabungan memegang peranan krusial sebagai sumber pendanaan bagi lembaga keuangan, termasuk bank dan lembaga keuangan non-bank. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat melalui tabungan digunakan oleh lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman kepada individu, bisnis, atau badan lain yang membutuhkan dana. Simpanan masyarakat menjadi landasan bagi kegiatan intermediasi lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi mobilisasi dana dan redistribusi kembali kepada masyarakat.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, ada dua jenis tabungan:

1. Tabungan yang, pada prinsipnya, tidak diperbolehkan dalam bentuk tabungan berbunga.
2. Tabungan yang pada prinsipnya didasarkan pada prinsip mudharabah (bagi hasil) dan Madinah (penyimpanan).

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan nasabah yang likuid, artinya dapat ditarik kapanpun nasabah membutuhkannya, namun return yang ditawarkan kepada nasabah relatif kecil. Namun, bagi bank, bentuk mobilisasi dana melalui tabungan ini merupakan produk penagihan utang yang sedikit lebih mahal karena imbal hasil yang ditawarkan rendah. Namun demikian, nasabah yang menggunakan rekening tabungan biasanya lebih banyak dibandingkan dengan produk utang lainnya.

#### **b. Fungsi Kekayaan**

Dalam sistem keuangan, ia menyediakan instrumen keuangan yang memungkinkan individu untuk menyimpan kelebihan dana dalam bentuk obligasi, saham, obligasi pemerintah, dan instrumen lainnya. Instrumen ini memiliki nilai stabil dan tidak terdepresiasi dari waktu ke waktu tetapi dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi pemiliknya. Dibandingkan dengan menggunakan uang untuk membeli barang berwujud, menyimpan kekayaan dalam instrumen keuangan membantu menjaga nilainya dari depresiasi atau kerugian dari waktu ke waktu.

Dalam konteks ini, menyimpan kekayaan dalam instrumen keuangan menawarkan beberapa keuntungan. Pertama, instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan obligasi pemerintah umumnya memiliki stabilitas nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan barang berwujud atau aset fisik lainnya. Ini berarti bahwa nilai instrumen keuangan ini cenderung mengalami depresiasi minimal dari waktu ke waktu, memungkinkan pemiliknya untuk

mempertahankan nilai kekayaan mereka. Selain itu, instrumen keuangan dapat menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Misalnya, obligasi dapat memberikan bunga atau kupon berkala, sedangkan saham dapat memberikan dividen atau capital gain melalui apresiasi saham. Oleh karena itu, pemilik instrumen keuangan memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan yang signifikan dari kekayaan yang telah mereka simpan.

Dibandingkan dengan memegang uang tunai atau berinvestasi dalam barang berwujud, menyimpan kekayaan dalam instrumen keuangan menawarkan keuntungan menjaga nilai kekayaan dari depresiasi atau kerugian. Nilai barang berwujud cenderung terdepresiasi dari waktu ke waktu karena faktor-faktor seperti keausan fisik, perubahan tren pasar, atau teknologi yang berkembang. Namun, dengan menyimpan kekayaan dalam instrumen keuangan yang stabil, pemilik dapat melindungi nilai kekayaan mereka dari faktor-faktor tersebut.

Dengan demikian, fungsi kekayaan dalam sistem keuangan memberi individu pilihan untuk menyimpan kelebihan dana dalam instrumen keuangan yang mempertahankan nilainya dan berpotensi menghasilkan pendapatan. Hal ini memungkinkan pemilik instrumen keuangan untuk melestarikan dan meningkatkan kekayaan mereka dari waktu ke waktu sambil melindungi nilainya dari depresiasi atau kerugian yang mungkin terjadi dengan barang berwujud atau aset fisik lainnya.

### **c. Fungsi Likuiditas**

Fungsi likuiditas adalah kemampuan untuk dengan cepat dan mudah mengubah aset yang disimpan dalam instrumen keuangan, seperti obligasi, saham, atau instrumen lainnya, menjadi uang tunai dengan risiko minimal ketika pemilik instrumen membutuhkan likuiditas. Dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, likuiditas menjadi sangat penting karena pemilik instrumen dapat segera memperoleh dana yang diperlukan tanpa harus menjual aset dengan harga yang tidak menguntungkan.

Kehadiran likuiditas di pasar keuangan memainkan peran penting dalam menjaga fleksibilitas dan stabilitas keuangan. Pemilik instrumen dapat dengan mudah menjual atau memperdagangkan aset mereka di pasar uang atau pasar modal untuk mendapatkan uang tunai. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengatasi keadaan darurat atau memanfaatkan peluang investasi yang mungkin timbul.

Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai uang yang disimpan di bank dapat dipengaruhi oleh inflasi. Ini berarti bahwa nilai uang itu dapat menurun seiring waktu karena menurunnya daya beli yang disebabkan oleh kenaikan harga. Oleh karena itu, meskipun menabung di bank merupakan cara yang relatif aman untuk menjaga likuiditas, namun imbal

hasil atau keuntungan yang diperoleh dari tabungan bank cenderung lebih rendah dibandingkan dengan instrumen keuangan lain yang diperdagangkan di pasar keuangan. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar keuangan sering menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi tetapi juga melibatkan risiko yang lebih tinggi.

Kesimpulannya, fungsi likuiditas di pasar keuangan adalah untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam mengkonversi aset keuangan menjadi uang tunai sehingga pemilik instrumen dapat dengan cepat memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Sementara menabung di bank adalah pilihan yang relatif aman, berinvestasi pada instrumen keuangan lain yang diperdagangkan di pasar keuangan dapat memberikan potensi pengembalian yang lebih tinggi, meskipun dengan risiko yang lebih tinggi.

#### **d. Fungsi Kredit**

Di pasar keuangan, ia melampaui likuiditas dan tabungan dan melibatkan penyediaan fasilitas kredit sebagai sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan investasi. Dalam hal ini, lembaga keuangan, seperti bank, memberikan pinjaman kepada peminjam dengan pembayaran bunga sebagai kompensasi atas penggunaan dana pinjaman. Melalui kredit, konsumen dapat membeli barang-barang seperti rumah dan mobil, sementara bisnis membutuhkan kredit untuk mendanai produksi dan investasi mereka. Fungsi kredit juga penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan tersedianya kredit, individu dan bisnis dapat memperluas kegiatan ekonomi mereka. Investasi yang didanai kredit dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, menciptakan peluang kerja, dan mendorong perekonomian secara keseluruhan. Memfasilitasi sirkulasi kredit memungkinkan perputaran uang yang lebih cepat dalam perekonomian, memungkinkan akses fleksibel ke dana untuk memenuhi kebutuhan dan membiayai transaksi. Ini menghasilkan aliran uang yang lebih dinamis di pasar, merangsang aktivitas ekonomi yang lebih besar.

Melalui pemberian kredit, lembaga keuangan dapat membantu mengurangi ketimpangan kekayaan di masyarakat. Kredit memberikan kesempatan bagi individu atau bisnis dengan dana pribadi terbatas untuk mengakses sumber daya keuangan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, kredit dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua pihak untuk memanfaatkan peluang ekonomi.

Selain itu, peran kredit dalam meningkatkan daya beli konsumen cukup signifikan. Dengan kemampuan untuk memperoleh kredit, konsumen dapat membeli barang dan jasa yang mungkin tidak dapat mereka akses langsung dengan uang tunai. Ini memberikan dorongan untuk permintaan konsumen dan mendorong pertumbuhan di sektor bisnis.

### **e. Fungsi Pembayaran**

Dalam sistem keuangan, ada berbagai alat yang disediakan untuk menciptakan sistem pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Instrumen yang paling umum digunakan termasuk cek, transfer bank, kartu kredit, dan kartu debit. Saat ini, bank menawarkan berbagai layanan transaksi pembayaran, seperti penagihan, transfer elektronik, perbankan telepon, dan banyak lagi. Kemajuan teknologi juga telah membawa tren baru dalam bentuk pembayaran online atau sistem transfer. Bagi bank, ini bisa menjadi pilihan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan basis pendapatan mereka dari layanan pembayaran.

Penyebab Meningkatnya Peran Lembaga Keuangan Perbankan dan Non Perbankan dalam Memberikan Distribusi Keadilan Sosial Peningkatan distribusi keadilan sosial kepada masyarakat merupakan salah satu peran penting lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan, memastikan akses terhadap layanan keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Selama dekade terakhir, peran lembaga keuangan, baik perbankan, maupun non-perbankan, telah tumbuh lebih kuat. Beberapa faktor mendorong semakin kuatnya peran lembaga keuangan, termasuk lembaga perbankan dan non-perbankan, yaitu:

- a. Pertumbuhan signifikan dalam pendapatan kelas menengah. Keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup, terutama kelas menengah, memiliki porsi pendapatan yang dapat mereka tabung setiap tahun. Lembaga keuangan menawarkan opsi penghematan yang bermanfaat bagi mereka.
- b. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Lembaga keuangan telah terbukti mampu memenuhi modal dan kebutuhan keuangan industri, yang cenderung melimpah dan bersumber dari penabung.
- c. Nilai nominal instrumen keuangan yang tinggi menyulitkan penabung kecil untuk mengaksesnya. Banyak sekuritas dan obligasi pasar uang yang menarik memiliki nilai nominal yang besar, sehingga sulit bagi penabung kecil untuk mengakses atau membelinya. Namun, dengan mengumpulkan dana dari banyak penabung, lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk mendapatkan instrumen keuangan yang menarik ini.
- d. Skala ekonomi dalam produksi dan distribusi layanan keuangan. Menggabungkan sumber daya dalam produksi berbagai layanan keuangan dalam jumlah besar memungkinkan lembaga keuangan untuk menjaga harga layanan serendah mungkin, memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain yang menawarkan layanan keuangan.

- e. Lembaga keuangan menyediakan layanan likuiditas unik yang mengurangi biaya likuiditas bagi pelanggan mereka. Ketidakpastian arus kas dalam bisnis dan individu meningkatkan risiko jika mereka tidak likuid ketika menghadapi kebutuhan likuiditas yang mendesak, yang dapat mengakibatkan penalti. Untuk mengatasi kebutuhan ini, lembaga keuangan menjual layanan likuiditas seperti deposito.
- f. Peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas: Baik lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan dapat meningkatkan aksesibilitas keuangan dan inklusivitas bagi masyarakat. Dengan menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang mudah diakses dan memenuhi kebutuhan masyarakat, lembaga-lembaga tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan keuangan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua segmen masyarakat.
- g. Pemberdayaan ekonomi: Melalui pinjaman, investasi, dan dukungan keuangan lainnya, lembaga keuangan dapat menyediakan modal yang diperlukan bagi individu dan bisnis untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan dalam mempromosikan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan secara finansial.
- h. Pendidikan keuangan: Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam memberikan pendidikan keuangan kepada publik. Dengan meningkatkan pemahaman tentang manajemen keuangan, investasi, dan manajemen risiko, lembaga keuangan dapat membantu individu membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan mengurangi ketidakadilan yang disebabkan oleh ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman.
- i. Mendukung peraturan dan kebijakan: Lingkungan peraturan dan kebijakan yang mendukung juga dapat mempengaruhi peningkatan peran lembaga keuangan dalam menyediakan distribusi keadilan sosial. Pemerintah dapat mendorong inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen, dan mempromosikan persaingan yang sehat di sektor keuangan melalui peraturan yang tepat.

Mempertimbangkan faktor-faktor ini bersama-sama, peran lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan dapat ditingkatkan dalam menyediakan distribusi keadilan sosial kepada masyarakat. Namun, penting untuk diingat bahwa distribusi keadilan sosial adalah masalah kompleks yang membutuhkan upaya lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dan seluruh masyarakat.

## **Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab Lembaga Keuangan: Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dalam Masyarakat**

Prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab lembaga keuangan, termasuk bank dan lembaga keuangan non-bank, memainkan peran penting dalam masyarakat. Berikut adalah penjelasan dari kedua prinsip tersebut:

### **1. Prinsip Keadilan:**

Prinsip keadilan berfungsi sebagai landasan fundamental dalam kegiatan lembaga keuangan di masyarakat. Prinsip ini mengacu pada perlakuan yang adil dan setara dari semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Beberapa aspek penting dari prinsip keadilan dalam lembaga keuangan antara lain:

- a) sebuah. Perlakuan yang adil terhadap pelanggan: Lembaga keuangan diharapkan untuk memberikan perlakuan yang adil kepada pelanggan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau faktor lain yang tidak relevan. Ini termasuk proses pinjaman yang adil, suku bunga yang wajar, dan penanganan keluhan yang efektif.
- b) Transparansi informasi: Lembaga keuangan harus memberikan informasi yang jelas dan terperinci kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai produk, layanan, dan biaya terkait. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan memahami implikasi dari transaksi mereka.
- c) Kepatuhan terhadap peraturan: Lembaga keuangan harus mematuhi peraturan yang berlaku untuk memastikan bahwa kegiatan mereka dilakukan dengan benar dan tidak merugikan orang lain. Ini termasuk kepatuhan terhadap undang-undang perbankan, peraturan anti pencucian uang, dan langkah-langkah perlindungan konsumen.

### **2. Tanggung Jawab Sosial Lembaga Keuangan:**

Baik bank maupun lembaga keuangan non-bank memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat di mana mereka beroperasi. Tanggung jawab sosial lembaga keuangan meliputi:

- a) Pemberdayaan ekonomi: Lembaga keuangan berperan dalam menyediakan akses keuangan kepada individu dan bisnis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk memberikan kredit kepada usaha kecil dan menengah yang membutuhkan modal untuk pengembangan.
- b) Kesejahteraan masyarakat: Lembaga keuangan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan mendukung program sosial dan memberikan kontribusi di bidang-bidang seperti pendidikan, perawatan kesehatan, lingkungan, atau pengentasan kemiskinan. Hal ini memperkuat peran lembaga keuangan sebagai mitra pembangunan di masyarakat.

c) Etika bisnis: Tanggung jawab lembaga keuangan juga mencakup praktik bisnis yang etis, menghindari praktik keuangan yang merugikan masyarakat, seperti penipuan, penyalahgunaan informasi, atau praktik diskriminatif.

Penerapan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial sangat penting bagi lembaga keuangan karena memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mereka dan mendorong stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam Islam, keadilan didefinisikan sebagai "tidak menindas atau mengalami ketidakadilan." Konsekuensi ekonomi dari nilai ini adalah pelaku ekonomi tidak boleh mencari keuntungan pribadi jika merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Tanpa keadilan, masyarakat menjadi terbagi menjadi beberapa kelompok, dengan satu kelompok menindas yang lain, mengakibatkan eksploitasi. Setiap orang berusaha untuk mendapatkan manfaat yang lebih tinggi daripada ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kerusakan.

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa pembangunan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moralitas memiliki potensi untuk mencapai keadilan sosial di masyarakat. Integrasi etika dan ekonomi membangun sistem ekonomi berdasarkan pembangunan yang adil, untuk mencegah kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan membentuk peradaban humanistik.

Pandangan dunia ekonomi etis mencakup beberapa elemen kunci:

- a) Kekayaan dan aset semata-mata dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan, sehingga setiap proses ekonomi, baik pendapatan maupun pengeluaran, tidak boleh melanggar etika.
- b) Tuhan, sebagai pencipta, adalah pemilik mutlak atas segalanya, sedangkan manusia dipercayakan untuk menggunakannya berdasarkan prinsip yang ditentukan oleh pemilik mutlak.
- c) Memperoleh kepemilikan dan kepercayaan sangat tergantung pada upaya yang dilakukan untuk mencapainya dan didasarkan pada nilai-nilai relevan yang harus dipatuhi.
- d) Terkait pemberian hak, harus memenuhi dua tujuan utama, yaitu kesejahteraan individu (kesejahteraan pribadi) dan kesejahteraan sosial.

Al-Qur'an memandu nilai-nilai moral dan spiritualitas untuk berkoordinasi dan mendapatkan manfaat dari setiap kemampuan manusia. Manusia memiliki tanggung jawab dalam setiap tindakan dan diminta untuk memanfaatkan setiap kemampuan yang diberikan oleh pemilik mutlak untuk memberikan kesejahteraan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Dalam Islam, kemakmuran dapat dicapai ketika nilai-nilai sosial dipupuk secara komprehensif dalam kehidupan suatu bangsa. Salah satu implementasi pencapaian tujuan sosial adalah praktik kepedulian sosial dalam bentuk Islamic Corporate Social Responsibility (CSR). Oleh

karena itu, CSR Islam adalah paradigma yang komprehensif dan holistik karena mencakup beberapa esensi, termasuk:

- a) Tanggung jawab Islam (daruriyat): CSR Islam didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang diamanatkan oleh Islam. Ini termasuk memenuhi kewajiban dasar terhadap sesama manusia, seperti memberikan hak yang sah kepada konsumen, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat.
- b) Kepedulian sosial terhadap lingkungan: CSR Islam menghargai pentingnya melestarikan lingkungan dan bertanggung jawab atas dampak kegiatan bisnis terhadap alam.
- c) Memenuhi harapan pemangku kepentingan dan masyarakat: CSR Islam mempertimbangkan kepentingan dan harapan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat umum dalam melakukan kegiatan bisnis.
- d) Mengurangi ketidakadilan sosial: CSR Islam bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mempromosikan keadilan dalam distribusi sumber daya dan manfaat ekonomi.
- e) Upaya untuk mendapatkan legitimasi masyarakat: CSR Islam juga berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat atas bisnis yang dilakukan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam setiap aspek operasional.
- f) Menciptakan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya: CSR Islam mendorong terciptanya lingkungan yang aman, baik dalam aspek fisik maupun moral.

Dengan demikian, CSR Islam mengadopsi pendekatan holistik dan komprehensif dalam melakukan kegiatan bisnis, dengan mempertimbangkan aspek spiritual, etika, dan sosial yang merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip Islam.

CSR dalam perspektif Barat dan Islam memiliki perbedaan mendasar dalam konsepsi etika dan moralitas yang mendasarinya. Perspektif Barat menetapkan konsepsi sekuler tentang etika dan moralitas, di mana CSR diterapkan berdasarkan agenda pemenuhan keinginan pemangku kepentingan saja. Fokusnya sering pada memaksimalkan keuntungan atau mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan. Di sisi lain, CSR dari perspektif Islam didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang harus dihormati dan ditaati sebagai tindakan pengabdian kepada Allah. CSR Islam tidak semata-mata tentang mencari keuntungan maksimal atau mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan tetapi memenuhi tanggung jawab sosial yang mengarah pada kebaikan baik di dunia maupun akhirat.

Pelaksanaan CSR Islam juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan persaudaraan. Ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) bagi semua manusia, mengingat prinsip-prinsip Islam yang mempromosikan kemakmuran.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga keuangan memainkan peran yang beragam, termasuk lembaga perbankan seperti bank sentral, bank konvensional, bank syariah, bank kredit rakyat tradisional, dan bank kredit rakyat syariah. Selain itu, ada lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun seperti TASPEN, koperasi, pasar modal atau bursa efek, perusahaan pembiayaan faktur, perusahaan modal ventura, pegadaian, perusahaan leasing, perusahaan kartu kredit, pasar uang, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan konsumen. Peran ini mencakup mobilisasi dana dari publik, alokasi dana kepada publik, transfer aset, penyediaan likuiditas, alokasi pendapatan, dan transaksi keuangan. Selain itu, baik lembaga keuangan perbankan maupun non-bank memiliki peran penting dalam memastikan pemerataan kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi lembaga keuangan sebagai perantara dalam mekanisme pembayaran antar pelaku ekonomi, penyedia dana bagi yang membutuhkan, dan pengurangan risiko bagi deposan.
2. Beberapa faktor berkontribusi terhadap semakin kuatnya peran lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan dalam mencapai kesetaraan sosial. Salah satunya adalah peningkatan pendapatan yang signifikan di kalangan kelas menengah. Keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup, terutama kelas menengah, dapat menabung dalam jumlah tertentu setiap tahun. Selain itu, pesatnya perkembangan industri dan teknologi telah menunjukkan bahwa lembaga keuangan dapat memenuhi modal dan kebutuhan keuangan industri melalui dana besar dari deposan.
3. Prinsip keadilan dan tanggung jawab bank dan lembaga keuangan non-bank berpotensi untuk mencapai keadilan sosial di masyarakat. Integrasi etika dan ekonomi membangun sistem ekonomi berdasarkan pemerataan pembangunan, mencegah kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dan membentuk peradaban humanistik. Salah satu implementasi untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui Corporate Social Responsibility (CSR). CSR merupakan strategi perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan para pemangku kepentingannya, namun pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah, kepastian hukum, dan jaminan ketertiban. Sebagai organisasi sosial, perusahaan perlu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, institusi perlu mempertimbangkan dampak kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan melalui program CSR.

Dalam konteks perbankan, bank memiliki hubungan langsung dengan masyarakat dalam upaya perbaikan perekonomian. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, beberapa bank melaksanakan program CSR yang mencakup pembangunan infrastruktur publik, bantuan bencana alam, dukungan pendidikan, kesehatan dan ibadah, serta pelestarian lingkungan.

Berdasarkan kesimpulan ini, beberapa rekomendasi dapat disarankan:

1. Kebijakan yang jelas dan adil diperlukan agar masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi dan memahami fungsi lembaga keuangan nonbank dalam masyarakat. Lembaga perbankan menawarkan lebih banyak pilihan aksesibilitas dibandingkan dengan lembaga keuangan non-bank dari perspektif tertentu, sehingga diperlukan kebijakan pendukung untuk memastikan akses yang luas ke lembaga keuangan non-bank bagi masyarakat.
2. Dengan pesatnya perkembangan industri dan teknologi, lembaga keuangan telah membuktikan kemampuannya untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan keuangan sektor industri, yang biasanya berlimpah dan berasal dari deposan. Oleh karena itu, lembaga keuangan nonbank perlu menyelaraskan dengan lembaga perbankan dalam memberikan akses keadilan ekonomi yang luas bagi masyarakat.
3. Dengan berpegang pada prinsip keadilan dan tanggung jawab, lembaga keuangan, baik bank, maupun non-bank, dapat mencapai keadilan sosial melalui CSR. Pendekatan ini membantu mencegah kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan menumbuhkan peradaban humanistik di masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, S.H. (2022). *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika.
- Ambarwati, J., & Vitaningrum, M.R. (2021). Pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Kompetitif Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 128.
- Aprita, SAS (2021). Peran pinjaman peer-to-peer dalam mendanai usaha kecil dan menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37-61.
- Bangsawan, M. I. (2017). Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1), 24-34.
- Bangsawan, M. I., Absori, A., Syamsuddin, D., Waston, W., Diarti, D. K., Budiono, A., & Rizka, R. (2022). *The Politics of Sharia Banking Law Development in the Era of the*

- Industrial Revolution 4.0. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(1), 42-47.
- Irfani, N. (2020). Prinsip Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Interpretasi, Masalah, dan Penggunaan dalam Penalaran Hukum dan Argumentasi. *Jurnal Perundang-undangan Indonesia*, 16(3), 305-325.
- Iswandi, A. (2021). Peran Lembaga Zakat, Infaq, dan Wakaf dalam Distribusi Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi Islam*, 13(02), 96-107.
- Laili, A., & Noviarita, H. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *ASAS*, 13(2), 49-65.
- Maksum, M. (2022). Hukum Kafalah Fee di Lembaga Keuangan Syariah dari Perspektif Fiqh. *Investasikan Jurnal Syariah & Hukum Ekonomi*, 2(1), 46-62.
- Pamungkas, FT, & Zulfikar, AA (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Fraud pada Bisnis Investasi dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(1), 19-40.
- Perger, T., Wachter, L., Fleischhacker, A., & Auer, H. (2021). PV Sharing di Komunitas Lokal: Perdagangan Peer-to-Peer dengan Pertimbangan Ketersediaan Prosumer untuk Membayar. *Kota dan Masyarakat Berkelanjutan*, 66, 102634.
- Putra, D.A., Marliyah, M., & Yafiz, M. (2021). Analisis pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan, dan bancassurance terhadap laba dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus bank syariah di Indonesia). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 21-42.
- Ramadhan, M.F., & Padang, N.S. (2022). Analisis Tingkat Kesejahteraan Pedagang Mama-Mama Papua setelah Pindah ke Pasar Sentral Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 6(1), 1-20.
- Rosida, I.N. (2021). Analisis Dampak Praktik Riba (Riba) pada Lembaga Keuangan Non Bank terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(1), 17-26.
- Soleman, R., & Nainggolan, B. (2022). Peran Lembaga Keuangan Non-Bank dalam Masyarakat. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 33-44.
- Utama, A.S., Iqsandri, R., Susanty, A.P., & Permana, F.A. (2021). Perlindungan Negara atas simpanan nasabah di perbankan. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 2(1), 48-60.
- Vanni, KM (2022). Sosialisasi Pembiayaan Bank Syariah melalui Platform Digital. *Malik Al-Shalih: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 66-73.

Amaroh, S. (2014). Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Islam. *Ekonomika*, V, 94-96.

.